

***Governmentality* dalam Program Jalin Matra : Studi Kebijakan Pengentasan
Kemiskinan Pemerintahan Soekarwo Periode 2014-2019 Jawa Timur**

Hani Oktavia Trianahadi*

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap daerah tanpa terkecuali di Jawa Timur. Pada pemerintahan Soekarwo periode 2014-2019 membawa program yang dinamakan Jalin Matra sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi dalam program Jalin Matra pada tulisan ini terkait praktik berjalannya program Jalin Matra terkait relasi antar aktornya. Hal ini didukung oleh adanya fenomena ketidaktepatan sasaran penerima bantuan program yang dinyatakan oleh beberapa anggota DPRD dan anggaran bantuan yang dipangkas oleh pemerintah desa. Fenomena tersebut akan dilihat melalui Teori *Governmentality* dari Foucault dengan melihat relasi tiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Jalin Matra. Teori *Governmentality* menjelaskan tentang bentuk kekuasaan didasari oleh kebebasan yang identik dengan adanya praktik pemberdayaan dan kekuasaan bersifat positif karena adanya sifat kesetaraan yang terjadi antar aktor yaitu, dengan menghilangkan sifat dominasi, dan dalam teori ini akan terlihat praktik kekuasaannya. Peneliti melihat bahwasanya konsep dari pemberdayaan pada program Jalin Matra sesuai dengan *Governmentality*.

Kata Kunci : *Governmentality, Program Jalin Matra, Relasi kekuasaan, Pengentasan kemiskinan, Jawa Timur*

* Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. trianahani@gmail.com

Abstract

Poverty is one of the problems that occur in every region in East Java. In 2014-2019 of Soekarwo government, a program called Jalin Matra was employed as one of the efforts to eradicate poverty in East Java. The problems that occur in the program Jalin Matra in this paper are related to the practice of Jalin Matra program and its correlation with the relationship between the actors. This is supported by the phenomenon of the inaccuracy of program beneficiary targets stated by some DPRD members and aid budget which is cut by the village government. The phenomenon will be seen through Foucault's *Theory of Governmentality* by looking at the relationships of each actor involved in the implementation of the Jalin Matra program. *Governmentality theory* explains the form of power based on the freedom that is identical with the existence of empowerment practices and power is positive because of the nature of equality that occurs between actors that is by eliminating the nature of domination, and in this theory the practice of power will be seen. The researcher sees that the concept of empowerment in Jalin Matra program is in accordance with *Governmentality*.

Keywords : *Governmentality, Jalin Matra Program, Power Relation, Poverty Alleviation, East Java*

Pendahuluan

Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) merupakan program unggulan yang menjadi ciri khas dari pemerintahan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (KARSA). Tujuan dari program ini yaitu, untuk mempercepat penanggulangan permasalahan kemiskinan dengan melakukan peningkatan dan membenahi program sebelumnya atau yang telah ada. Metode pelaksanaan program Jalin Matra ini pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha sesuai dengan ketentuan tiap masing-masing sub programnya yang dibagi menjadi tiga sub program yaitu, Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman umum pelaksanaan Jalin Matra dan selalu diperbaharui setiap tahunnya menjadi dasar yuridis dan pelaksanaan Jalin Matra. Tidak hanya itu Jalin Matra merupakan turunan dari visi dan misi dari KARSA yang pada intinya menginginkan masyarakat dapat hidup sejahtera dengan usaha yang mereka miliki atau dengan kata lain hidup mandiri yang kemudian termasuk salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan permasalahan kemiskinan yang selama ini diperkuat oleh beberapa faktor yang salah satunya permasalahan lapangan kerja yang kurang, oleh karena itu dengan wirausaha masyarakat dapat mendirikan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri sehingga mampu menyokong kehidupannya untuk jangka panjang.

Konsep Jalin Matra yang dinilai cukup baik, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan di dalamnya seperti halnya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan adanya penilaian tidak tepat sasaran yang diberikan oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, meskipun melalui permasalahan tersebut tidak dinilai sebagai program yang tidak efektif. Oleh karena itu permasalahan ini dikaji dengan melihat relasi yang terjadi pada aktor-aktor terkait dalam praktik program Jalin Matra. Melalui hal tersebut dapat dilihat hubungan timbal balik antar aktor dengan masyarakatnya, akan terlihat pula yang paling diuntungkan atas adanya program ini dan yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang paling banyak,

Teori *Governmentality* merupakan relasi kekuasaan yang bersifat *disciplinary power* yaitu, menganggap bahwasannya kekuasaan bersifat positif dan tidak ada hubungan hirarki (sifat dominasi) sehingga tidak ada hukuman yang dikeluarkan dari yang memiliki kekuasaan, sedangkan pengontrolan yang hampir sama dengan *sovereign power* yang

memperbolehkan hukuman namun bukan dalam bentuk dominasi namun suatu keadaan yang membuat individu tersebut dapat mengontrol dirinya.

Kajian serupa mengenai *Governmentality* yang *pertama* yaitu, ditulis oleh Ni'am membahas penolakan relokasi oleh masyarakat setelah terjadinya bencana Gunung Merapi oleh aktor yang terlibat kontestasi didalamnya. Teori *Governmentality* merupakan kepengaturan (*conduct of conduct*) dengan kata lain teknis dan prosedur yang dibuat dengan adanya otoritas yang bertanggung jawab (bukan dominasi) dan diterapkan oleh individu-individu sesuai yang dimaksud oleh Foucault. Program relokasi menggunakan pendekatan komunitas sehingga tidak bersifat memaksa ataupun melegalkan kekerasan. Hasil analisis dari kajian ini *pertama*, karakteristik negara lebih kepada rezim pengatur, aparatus birokrasi atau kebijakan pemerintah dengan teknik pengaturannya masyarakat diyakinkan pentingnya relokasi dengan kata lain negara melakukan otoritas dan kewenangannya atas nama kebenaran. *Kedua*, Rekompak memiliki peran sebagai prokutor proyek yang berkerja sama dengan kepala dusun, kepala desa, gubernur, dinas dan badan terkait, dan warga. *Ketiga*, peta rawan bencana yang dijadikan dasar kebijakan memuculkan distingtif pada kawasan bukan awan bencana. *Keempat*, meskipun adanya penolakan namun bukan menjadi antipati pada otoritas kepengaturan karena beberapa perilaku masyarakat masih terlibat dalam program tersebut salah satunya menyiapkan tim siaga.¹

Kajian serupa dengan Teori *Governmentality* yang ditulis oleh Umar membahas terkait program yang ditawarkan oleh Uni Eropa (UE) dengan perjanjian kerjasama organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan. Kehadiran UE dinilai sebagai instrumen dalam menebarkan norma yang sesuai dengan konsep pemerintahan menurut Foucault yaitu, dalam proses mendisiplinkan dunia ketiga dengan program penguatan masyarakat sipil yang termasuk *good governance* dan dukungan dana mempermudah penyebaran norma terkait HAM dan Demokrasi. Pemberian *grant* untuk kelompok masyarakat sipil dalam melakukan advokasi atau pemberdayaan masyarakat maka secara tidak langsung terjadinya inklusi terkait *governmentality* karena *good governance* dianggap sebagai norma yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil yang kemudian dianut dalam Undang-Undang dan dokumen perencanaan. Kajian ini

¹ Ni'am, Lubabun. 2014. *Kepengaturan dan Penolakan Relokasi : Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18 Nomor 1. Halaman 2-18

menyimpulkan bahwasannya norma-norma *good governance* masih berada di dalam konteks *neoliberal governmentality* yang ditanamkan di Indonesia setelah reformasi.²

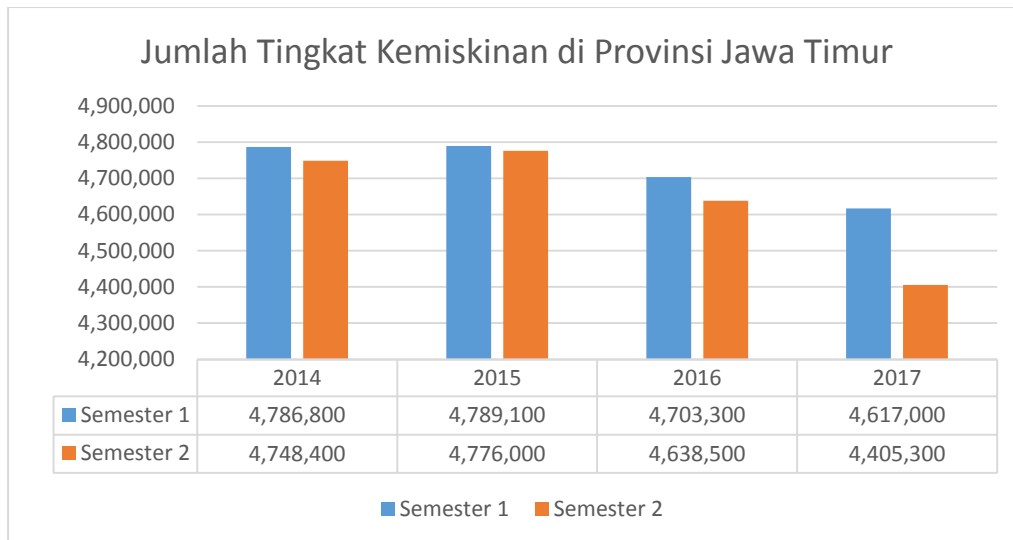
Menjalankan program yang sesuai dengan tujuannya memerlukan relasi yang baik tiap aktornya, namun setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda dan membutuhkan kekuasaan begitupula dalam Jalin Matra, dengan hal tersebut akan diketahui kekuasaan yang didapatkan oleh tiap aktor dan mengetahui siapa yang paling diuntungkan. Tidak hanya itu Teori *Governmentality* dari Foucault menunjukkan bentuk dan pelaksanaan program pada Jalin Matra dan hal inilah yang menjadi fokus penelitian.

Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur

Kondisi Jawa Timur yang memiliki beberapa daerah industri dan perdagangan mempengaruhi perkembangan ekonominya secara lokasi Jawa Timur terletak diantara Bali dan Jawa Tengah yang merupakan dua provinsi besar yang menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan industri dan perdagangan. Namun, dengan kenyataan kondisi Jawa Timur kemiskinan masih menjadi permasalahan pemerintah. Adanya kondisi ketimpangan pada tiap daerah antara industri dan perdagangan dengan wilayah biasa dan ini mengakibatkan pembangunan daerah yang tidak merata. Sehingga kemiskinan tidak hanya diabntu dengan bantuan tunai yang langsung konsumsi melainkan berupa modal usaha yang memang dibutuhkan oleh kondisi masyarakat di Jawa Timur tepatnya di desa agar pembangunan ekonomi yang merata.

Kemiskinan yang melanda Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan utama dalam pemerintahan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (KARSA) di periode ke dua dengan mengusung Jalin Matra yang mana terjadi penurunan angka kemiskinan sejak kemunculan program yaitu, tahun 2014 hingga 2017 meskipun pada 2015 mengalami kenaikan.

² Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2014. *Bukan Sekadar "Kekuatan Normatif" : Uni Eropa, Good Governance dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 5 No.1. Halaman 23-46



Grafik 1.1 Jumlah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ³

Dimulai tahun 2014 semester 1 terdapat 4.786.800 Jiwa jumlah kemiskinan Jawa Timur dan di semester 2 di tahun yang sama turun hingga 38.400 jiwa. Tahun 2015 semester 1 meningkat menjadi 4.789.100 jiwa. Adanya penurunan kembali pada tahun 2015 semester 2 menjadi 4.776.000 jiwa, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya kemiskinan Jawa Timur semakin lama mengalami perubahan pada jumlah kemiskinan yang terus menurun, meski cenderung lamban. Penurunan kemiskinan pada tahun 2016 semester 2 menjadi 4.638.500 jiwa yang kemudian di tahun 2017 penurunan angka kemiskinan cukup banyak menjadi 4.405.300 jiwa.

Program Jalin Matra

Program Jalin Matra terbagi menjadi tiga jenis program dengan menggolongkan masyarakat sesuai dengan kondisi yang dialami yaitu sebagai berikut, *Pertama*, Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), permasalahan rumah tangga yang berada jauh atau paling bawah garis miskin atau dengan kata lain tergolong sangat miskin, jika berdasarkan desil maka kondisi ini berda pada desil 1 sehingga dalam program ini jenis bantuan yang diberikan berupa bantuan modal usaha agar rumah tangga sasaran (RTS) memiliki penghasilan sendiri.

Kedua, Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), pemerintah memfokuskan program ini pada kondisi rumah tangga yang rentan atau dapat dikatakan Tangga Hampir Miskin (RTHM). Rentan miskin adalah kondisi masyarakat yang daat

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*.

langsung jatuh miskin apabila kondisi yang tidak diinginkan datang atau perubahan kondisi secara mendadak seperti, bencana alam, sakit, kenaikan harga sembako dan lain sebagainya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa pinjaman modal berupa uang yang telah dianggarkan berdasarkan bentuk usahanya dan mengembalikan modal dengan cara angsuran.

Ketiga, Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, berfokus pada permasalahan kemiskinan kaum perempuan yang menjadi kepala rumah tangga atau dapat dikatakan sebagai janda. Menggunkan prinsip yang sama dengan BRTSM namun membedakan dalam sasarannya yaitu memberikan bantuan berupa modal usaha berupa barang (non tunai) agar perempuan atau janda tersebut dapat keuar dari garis kemiskinan.

Berlangsungnya program Jalin Matra dengan membagi ke tiga jenis program melibatkan aktor-aktor dalam menyukseskan keberlangsungan program sebagai pengawasan dan menjalankan program. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat terjalin sesuai dengan tugas dan fungsinya antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tim perencana (KARSA dan Tim pembuat program), SKPD dengan SKPD, SKPD dengan masyarakat, yang disebut sebagai relasi antar aktor. Sedangkan relasi kekuasaan (*governmentality*) harus terjalin hubungan timbal balik yang baik pada tiap aktornya sehingga kekuasaan akan terus berjalan dan membentuk sebuah relasi. Seperti halnya yang terjadi pada program Jalin Matra yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur, SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Pendamping Jalin Matra (provinsi, kabupaten dan desa) dan Masyarakat.

Jalin Matra dibuat pemerintah untuk memberikan bantuan berupa non tunai adapun pemberian pinjaman modal dalam program PK2, uang tidak digunakan serta merta melainkan untuk modal usaha dan ini juga dikembalikan secara berangsur, sedangkan program lainnya diberikan modal berupa barang keperluan usaha seperti contohnya di dalam penelitian ini Sampun yang merupakan tukang tambal ban menerima bantuan berupa ban sebagai modal barang yang akan dijual kembali. Anggaran program Jalin Matra telah ditentukan berdasarkan jenis programnya untuk BRTSM, PFK dan PK2 pada tahun 2015 dianggarkan Rp 100 Miliar dengan sasaran sejumlah 42.857 BRTSM dan terlaksanakan sebanyak 2.961 RTSM di tahun sebelumnya dan sebanyak 11.219 RTSM sebagai rencana tahun 2015.⁴ Sedangkan PFK yang lolos kriteria penerima bantuan 76.293 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yaitu, memiliki usia produktif (dibawah 65 tahun) dan memiliki anggota

⁴ Soekarno, Rahardi. *Ganti Baju Jalin Kesra Gubernur Jatim Launching Program 'Jalin Matra'*. http://www.beritajatim.com/government_news/226247/gubernur_jatim_launching_program_'jaln_matra'.html. Diakses pada tanggal 10 Febuari 2018

rumah tangga, tahun 2014 terlaksana sejumlah 33.309 dan tahun 2015 terlaksana sejumlah 14.655 KRTP. Program PK2 memiliki sasaran 1.000 desa dan 1.000 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang memiliki rencana mampu melaksanakan sebanyak 147 desa ditahun 2015.⁵ Tahun 2017 adanya kenaikan anggaran menjadi Rp 103 Miliar yang disebabkan oleh meningkatnya target perencanaan.

Pola Relasi Antar Aktor yang Terlibat Beserta Tugas dan Fungsinya

Keterlibatan aktor-aktor dalam program Jalin Matra dari keseluruhannya dibagi menjadi tiga yaitu, aktor dalam pembuatan kebijakan, aktor pelaksana dan aktor yang berada dalam Surat Keputusan Gubernur program Jalin Matra. Pemilihan aktor-aktor dalam program pemerintah disesuaikan dengan bidang keahliannya dan tidak harus dari instansi pemerintahan kadang kala masih bekerjasama dengan LSM, paerguruan tinggi dan swata. Begitu pula keterlibatan perguruan tinggi di Jawa Timur yaitu, Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UNM) dan Universitas Airlangga (UNAIR) dalam program Jalin Matra.

Terkait aktor dalam perencanaan program Jalin Matra melibatkan pemerintah provinsi Jawa Timur dan akademisi yang juga sebagai tim pemenang Soekarwo. Dalam hal ini aktor perencana memang bertugas dalam menyusun dan merencanakan program sebelum munculnya program tersebut melalui gagasan-gagasan sampai dengan konsep, mekanisme, anggaran dan pemilihan aktor-aktor program Jalin Matra. Aktor yang termasuk dalam program yang *pertama*, adalah Prof. Hotman Siahaan selaku akademisi dan Ketua Dewan Riset Provinsi Jawa Timur, keterlibatannya dalam program ini sebagai perancang keseluruhan atau konseptor program Jalin Matra dengan kata lain otak yang merancang konsep, tujuan, sasaran dan mekanisme berjalannya program Jalin Matra.

Kedua, yaitu para akademisi yang sekaligus tim pemenang dari KARSA dalam program Jalin Matra yang merupakan program turunan dari visi dan misi saat pencalonan Gubernur, sehingga terpilihnya akademisi tak lain karena ikut campur dalam memberikan saran dan gagasan untuk Jalin Matra. *Ketiga*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur yang bertugas sesuai fungsi penunjang yaitu, menyusun kebijakan menyangkut teknis program seperti anggaran, pelaksanaan administrasi, melakukan

⁵ Ibid.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.⁶ *Keempat*, DPRD provinsi Jawa Timur meskipun aktor tidak langsung, namun program ini merupakan turunan dari APBD dan dalam pembuatannya perlu persetujuan dari DPRD dengan menjalankan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan fungsinya yaitu, Fungsi Legislasi, Fungsi Keuangan (*budgeting*), dan Fungsi Pengawasan.

Selanjutnya mengenai aktor yang terlibat pelaksana atau eksekutor Jalin Matra, yaitu, *pertama*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang merupakan satu-satunya dinas yang ditugaskan sebagai eksekutor program Jalin Matra yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan dan memegang anggaran program untuk survei, fasilitator kegiatan (pembinaan dan sosialisasi) hingga evaluasi program dan membuat laporan yang ditujukan untuk Gubernur. *Kedua*, pendamping provinsi yang merupakan mitra dari DPMD memiliki latar belakang sebagai akademisi dari ketiga perguruan tinggi yang terlibat pada program Jalin Matra ini memiliki fungsi lebih pada teknis di lapangan yaitu, menyeleksi dan mempersiapkan pembekalan pendamping kabupaten agar mampu mendampingi kabupaten desa dan rumah tangga sasaran dalam menjalankan program Jalin Matra. Adanya fungsi *controlling* dan *monitoring* yang dilakukan oleh pendamping provinsi dalam setiap kegiatan pelaksanaan Jalin Matra. Daftar kebutuhan modal membuka usaha program dipegang oleh pendamping provinsi dan mendata jumlah bantuan yang akan diberikan pada program PK2 dalam hal ini pendamping provinsi akan menyampaikan proposal kepada DPMD.

Ketiga, pendamping kabupaten yang dipilih melalui seleksi dan pembekalan bertugas untuk mempersiapkan pendamping desa dan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program Jalin Matra. Sehingga kedekatan pendamping kabupaten pada masyarakat lebih erat dan keberlangsungan Jalin Matra di lapangan berada dipengawasan dan kinerja dari pendamping kabupaten sedangkan untuk pendamping desa secara berdampingan melakukan tugas yang dilakukan oleh pendamping kabupaten sebagai bentuk pembiasaan agar nantinya siap mendampingi RTS ketika pendamping kabupaten lepas tugas dari desa tersebut. Sedangkan adanya aktor yang disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan menyangkut dinas lainnya hanya mengetahui dan menunjang beberapa urusan di dalamnya menyangkut pembicara saat pembinaan

Setiap aktor yang terjalin dalam Jalin Matra memiliki tugas dan fungsinya sehingga dalam melaksanakannya terjadi relasi satu sama lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut,

⁶ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. *Tugas Pokok dan Fungsi*. <http://bappeda.jatimprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2018

pertama, relasi antara Tim Pembuat Program (Gubernur dan Akademisi) dengan SKPD terkait pada pembicaraan penentuan dinas yang menangani sekaligus memegang anggaran program Jalin Matra, dalam pelaksanaannya DPMD bertanggung jawab atas pelaporan perkembangan program Jalin Matra. *Kedua*, relasi SKPD dengan Pendamping baik provinsi maupun kabupaten/desa ini menyangkut adanya pelaporan dari *controlling* dan *monitoring* yang dilakukan saat pelaksanaan program di lapangan, SKPD (DPMD) dengan pendamping provinsi memiliki hubungan kemitraan sehingga terjadi pembagian tugas pada teknis lapangan terkait pencarian pendamping kabupaten dan permasalahan teknis lapangan diputuskan oleh pendamping provinsi sedangkan DPMD sebagai fasilitator pembinaan dan pemegang anggaran baik gaji pendamping kabupaten maupun bantuan modal usaha. Sedangkan hubungan SKPD yang tertera pada SK Gubernur hanya sebagai penunjang pembekalan ataupun pencarian data.

Ketiga, relasi Tim Pembuat Program dan Pendamping Provinsi terbentuk ketika menjadi tim sukses gubernur dengan memiliki latar belakang yang sama yaitu, akademisi. Hubungan terjadi saat memberikan gagasan terkait konsep keseluruhan program namun pada pembagian tugasnya Prof. Hotman sebagai Dewan Riset Daerah dan akademisi dari ketiga universitas yang bersangkutan yaitu (UB, UNM, UNAIR) menjadi pendamping provinsi. *Keempat*, relasi yang terjalin antara Pendamping dan Masyarakat (RTS), hubungan yang dekat terjadi pada pendamping kabupaten/desa dengan masyarakat karena mereka yang mendampingi dari pendataan saat survei dan memantau berjalannya program secara langsung. Sedangkan hubungannya dengan pendamping provinsi terjalin pada saat memberikan sosialisasi karena pendamping provinsi cenderung melakukan *monitoring* melalui sosial media. *Kelima*, relasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) yaitu, memiliki hubungan antara eksekutor program dan pembuat (mengesahkan) regulasi atau kebijakan terkait program. Adanya proses evaluasi yang dilakukan oleh legislatif terkait program Jalin Matra saat membicarakan pertanggung jawaban Gubernur pada tiap tahunnya.

Teori *Governmentality* dengan Temuan Data

Pernyataan yang diungkapkan oleh W.A Robson terkait ilmu politik ialah pembelajaran terkait bagaimana seseorang mampu menggapai, mempertahankan,

menjalankan atau bahkan menolak sebuah kekuasaan.⁷ Program Jalin Matra yang merupakan kekhasan kepemimpinan dari Soekarwo merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaannya karena program ini merupakan turunan dari misinya yaitu, mandiri dan sejahtera bersama wong cilik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ditunjukkannya akademisi yang sekaligus perancang program Jalin Matra tak lain agar program yang dijalankan mampu berjalan sesuai dengan pemikirannya sehingga akademisi dijadikan sebagai aktor perencana dan pelaksana. Keberhasilan dari program Jalin Matra merupakan salah satu keberhasilan dari kepemimpinannya dalam mewujudkan visi dan misi.

Soekarwo yang memiliki kedudukan tertinggi di daerah provinsi sebagai pelaksana program memiliki kewenangan dalam memerintah pelaksana program di bawahnya, sesuai dimensi-dimensi kekuasaan Ramlan Surbakti pada fenomena ini Soekarwo memenuhi dimensi potensial, positif, jabatan, eksplisit dan langsung.⁸ Penjelasan terkait hal tersebut dikarenakan kedudukan Soekarwo selaku Kepala Daerah atau Gubernur sebagai jabatan tertinggi pada provinsi menandakan adanya kekuasaan dan kewenangan yang besar pula salah satunya dalam hal melakukan perintah sesuai tugas dan jabatan seseorang yang mana termasuk sebagai sumber kekuasaan tidak hanya itu dalam pembuatan SK Gubernur untuk kepentingan program ini adanya izin untuk pendamping provinsi sebagai eksekutor lapangan tanpa perlu melalui urusan birokrasi terkait. Karena perintah yang diberikan oleh Gubernur dan langsung dilaksanakan ini memenuhi dimensi eksplisit dan langsung, namun program ini termasuk upaya menyejahterakan masyarakat maka dengan kata lain program ini bersifat positif.

Terkait tugas dan fungsi dari pendamping Jalin Matra dan DPMD sekilas sama. Namun, memiliki perbedaan dimana DPMD bertugas mengkoordinasi seluruh aktor yang terlibat dan bertanggung jawab memegang anggaran untuk keseluruhan program, sehingga monev tidak sesering pendamping provinsi. Pendamping provinsi bisa berinteraksi dengan seluruh aktor program Jalin Matra termasuk masyarakat yang memang diwajibkan untuk melakukan monev. Keputusan mendadak dilakukan oleh pendamping provinsi apabila terjadi pada pelaksanaan progra dengan surat kerja yang diberikan oleh Gubernur. Adanya Tugas dan fungsi yang sama yaitu, *monitoring* dan *controlling* antara DPMD dan pendamping ini pada kenyataannya kurang dilakukan oleh kedua. Peneliti melakukan penelusuran pada

⁷ Robson, W.A. 1954. *The University Teaching of Social Science: Political Science* (Teaching in the Social Sciences; Paris: UNESCO. Halaman 24

⁸ Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo. halaman 59-64

masyarakat terkait keaktifan aktor pelaksana pada saat melakukan monev dan pada kenyataannya mereka hanya melakukan kesediaan untuk menjadi penerima bantuan tidak ada arahan yang dilakukan oleh pendamping maupun dari DPMD.

Terkait hubungannya antara Teori *Governmentality* dengan adanya program Jalin Matra ialah program ini bersifat positif karena menyangkut kesejahteraan masyarakat khususnya di desa dengan bentuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan bentuk dari *governmentality*. Dalam penjelasannya Mudhoffir memperudah perbedaan antara relasi dominasi dan relasi kekuasaan (*governmentality*) sebagai berikut:⁹

⁹ Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18 No. 1. Halaman 97

Model Relasi Kekuasaan			
No.	Unsur-Unsur	Relasi Dominasi	Relasi Kekuasaan (<i>governmentality</i>)
1.	Model relasi aktor	Hubungan kekuasaan tidak setara (<i>state-sociaty, powerful-powerless, dominan-marginal</i>)	Hubungan kekuasaan setara antara subjek dan individu
2.	Aparatus	Dominasi dan hegemoni (<i>disciplinary power</i> dan bentuk kekerasan)	<i>Governmentality</i>
3.	Teknologi	Melegalkan tindakan kekerasan dan manipulasi ideologi	<i>Conduct of conduct</i>
4.	Basis relasi	Dominasi menghilangkan kebebasan	Kebebasan adalah dasar relasi kekuasaan.

Sumber: Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18 No. 1.

Untuk menyejahterakan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan hanya memberikan bantuan tunai melainkan perlu adanya program jangka panjang yaitu, berupa model usaha. Bentuk ini sengaja dibuat oleh konseptor agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melihat minimnya pekerjaan di desa. Kekuasaan menurut Foucault tidak bersifat negatif yaitu dengan adanya bentuk dominasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan cara paksaan dan koersif. Seperti halnya pada program Jalin Matra yang melakukan unsur paksaan namun bukan dalam ranah dominasi agar seseorang tersebut dapat bebas memilih pilihannya sendiri yaitu, memilih usaha yang akan dijalankan sesuai dengan minat dan keahliannya. Karena pada dasarnya seseorang tidak dapat meninggalkan atau terbebas dari kekuasaan, kekuasaan bersifat melebur dan tidak dapat dilihat secara langsung seperti halnya penerima bantuan tidak menyadari apabila dengan mengikuti

program Jalin Matra sesuai dengan pedoman umum dan peraturan gubernur juga bentuk dari kekuasaan dan tidak dapat disadari.

Jalin Matra tidak memiliki hukuman bagi para penerimanya karena pada Teori *Governmentality* tidak melegalkan sebuah hukuman namun, membiarkan masyarakat dapat menormalisasi dirinya sendiri, dalam program ini berlaku sistem kelompok sehingga apabila terjadi permasalahan seperti pada program PK2 yaitu pengembalian modal dan bunga akan dilakukan perundingan jika daerah tersebut tidak menganggap adanya bunga dan mengganti dengan istilah lain dan apabila pembayaran dalam kelompok itu terhambat maka akan ditegur atau diingatkan oleh masyarakatnya sendiri sebagai bentuk pendisiplinan dan mengontrol agar menjadi patuh hal ini sesuai prinsip *disiplinary power* dan tanggung renteng adalah sifat kerja sama kelompok tersebut yang termasuk sifat *conduct of conduct*.¹⁰

Foucault memiliki pemikiran yang disebut sebagai *episteme* yaitu, relasi kekuasaan dan pengetahuan yang berlaku pada saat itu bersifat otoritatif dan *legitimate*, sehingga dengan berlakunya hal tersebut dapat mempengaruhi praktik-praktik dan membuat sebuah hubungan sosial yang baru. Dalam pembahasan ini Prof. Hotman dan akademisi merupakan aktor dengan pengetahuan yang lebih dan dipercaya mampu memberikan gagasan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga diberikan kekuasaan sebagai konseptor dan pelaksana program yaitu, pendamping provinsi. Sedangkan Gubernur memiliki keuntungan yang lebih banyak dibanding yang lainnya karena dengan keberhasilan program Jalin Matra maka yang mendapatkan nama dan suara adalah Gubernur Soekarwo.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu RTS Desa Gamping yaitu, Bapak Sampun terkait permasalahan pungutan 300 ribu yang ditujukan untuk pajak yang dilakukan oleh Kepala Desa Gamping yang senyatanya tidak ada pemungutan biaya. Menganalisis dengan Teori *Governmentality* dari Foucault dimana adanya hubungan setara pada seluruh aktor termasuk masyarakat maka, tidak seharusnya ada penonjolan kekuasaan oleh salah satu aktor saja dalam hal ini kepala desa dianggap masih melakukan dominasi dengan menyalahgunakan keusaannya, maka kejadian ini dianggap melenceng dari konsep pemberdayaan Jalin Matra yang bahkan seharusnya pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk masuk dan mengatur pelaksanaan program.

¹⁰ Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18 No. 1. Halaman 80

Kesimpulan

Program Jalin Matra merupakan bentuk dari Teori *Governmentality* dimana secara konsep, tujuan dan sasaran dinilai cukup bagus, karena memikirkan kebutuhan masyarakat jangka panjang yaitu terkait pemberdayaan yang mana masyarakat diberikan bantuan berupa modal usaha agar dapat dijadikan pekerjaannya dan mampu memenuhi kebutuhan harian dengan hal ini penerima bantuan dapat menaikkan statusnya dari miskin menjadi tidak miskin. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dinilai dengan kondisi kosong atau nol karena bisa jadi seseorang tersebut berada di kondisi minus atau adanya hutang sehingga bantuan tunai hanya bisa untuk melunasi hutang tapi tidak dapat menyelesaikan kemiskinan, berbeda dengan usaha dengan membuka usaha maka ada penghasilan harian yang terus menerus.

Secara relasi antar aktornya terdapat kekuasaan dimana tiap aktor memiliki fungsi dan kewenangannya sedangkan konsep kekuasaan menurut Foucault tidak ada hubungan dominasi yaitu adanya *powerful* dan *powerless*. Hubungan setara terjalin antara pendamping provinsi dan DPMD. Namun, pada pelaksanaannya tugas dan fungsi tidak selalu berjalan dengan baik hal ini terbukti pada Gubernur sebagai pembina program hanya melakukan relasi sampai pada laporan dari aktor wilayah provinsi yaitu, DPMD dan pendamping dan tidak melakukan survei secara mendalam. Begitu pula yang dilakukan oleh pendamping dan DPMD yang kurang melakukan *monitoring* dan *controlling* dan hal ini diungkapkan oleh masyarakatnya sendiri apabila setelah pemberian bantuan dilakukan sudah tidak ada pendampingan secara intens.

Daftar Pustaka

Buku

Foucault. 1978. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.

Robson, W.A. 1954. *The University Teaching of Social Science: Political Science* (Teaching in the Social Sciences; Paris: UNESCO).

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Jurnal

Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18 No. 1

Ni'am, Lubabun. 2014. *Kepengaturan dan Penolakan Relokasi : Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 18 No. 1

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2014. *Bukan Sekadar "Kekuatan Normatif" : Uni Eropa, Good Governance dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 5 No.1

Internet

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. *Tugas Pokok dan Fungsi*. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2018). <http://bappeda.jatimprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

Badan Pusat Statistik. (Pada tanggal 22 Agustus 2017)
<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2012. *Pembekalan Tenaga Pendamping Program Jalin Kesra Tahun 2012*. (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017).
<http://dpmd.jatimprov.go.id/home-mainmenu-1/90-berita/386-pembekalan-tenaga-pendamping-program-jalin-kesra-tahun-2012>

Soekarno, Rahardi. (Diakses pada tanggal 10 Febuari 2018) *Ganti Baju Jalin Kesra Gubernur Jatim Launching Program 'Jalin Matra'*.
http://www.beritajatim.com/government_news/226247/gubernur_jatim_launching_program_'jalin_matra'.html.